

ABSTRAK

RINA ELVANIA, NPM : 2022212, Judul " IMPLEMENTASI PROGRAM TALI ASIH OPNAME KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA" dibawah bimbingan Ibu **Siti Raudah, S.Sos., M.AP** sebagai Pembimbing I dan Bapak **Mohammad Fajar Noorahman, M.Psi., M.AP** sebagai Pembimbing II.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Hulu Sungai Utara, melaksanakan program Tali Asih Opname Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Dalam pelaksanaannya mengalami permasalahan, antara lain informasi mengenai program belum tersosialisasi secara merata, tidak adanya kepastian tanggal pencairan, serta belum tersedianya sistem digital. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi dan juga apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasi Program Tali Asih Opname.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari 12 orang informan yang terdiri atas pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) serta anggota penerima santunan Tali Asih Opname, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Tali Asih Opname Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Hulu Sungai Utara belum berjalan dengan baik. Aspek komunikasi belum berjalan dengan baik karena transmisi informasi masih bersifat informal dan kepastian jadwal pencairan dana belum terwujud, meskipun substansi kebijakan sudah cukup jelas. Aspek sumber daya cukup berjalan dengan baik, jumlah staf sudah memadai namun belum didukung pelatihan formal, fasilitas publikasi informasi, dan sistem teknologi digital yang terintegrasi. Aspek disposisi sudah berjalan dengan baik, terlihat dari sikap pelaksana yang responsif dan komitmen pengurus yang tinggi. Sementara itu, aspek struktur birokrasi belum berjalan dengan baik karena SOP belum disahkan oleh Bupati dan koordinasi eksternal kepada instansi penerima manfaat masih lemah. Faktor penghambat meliputi lemahnya transmisi dan pemerataan informasi, ketiadaan SOP yang sah secara hukum, belum tersedianya sistem digital terintegrasi, serta lemahnya koordinasi eksternal kepada instansi penerima manfaat.

Disarankan kepada Kepala Bidang mutasi, promosi dan pengembangan karir agar mempercepat pengesahan Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada Bupati. Kepada pengurus KORPRI agar menetapkan jadwal pencairan dana yang pasti setiap bulannya, serta mengembangkan sistem informasi digital. Kepada pelaksana teknis agar memperluas saluran sosialisasi melalui media agar lebih mudah diakses, serta membangun koordinasi yang lebih terstruktur dengan seluruh instansi penerima manfaat agar hak kesejahteraan anggota dapat tersalurkan secara merata dan tepat waktu.

ABSTRACT

RINA ELVANIA, NPM: 2022212, Title " THE IMPLEMENTATION OF THE TALI ASIH OPNAME PROGRAM OF THE INDONESIAN CIVIL SERVANTS CORPS (KORPRI) AT THE BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) OF HULU SUNGAI UTARA REGENCY" under the guidance of **Siti Raudah, S.Sos., M.AP** as Supervisor I and **Mohammad Fajar Noorahman, M.Psi., M.AP** as second counsellor.

The Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Hulu Sungai Utara implements the Tali Asih Opname Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) program. During implementation, several problems arose: the program information has not been evenly socialized, there is no certainty about disbursement dates, and an integrated digital system is not yet available. This study aims to find out how the Tali Asih Opname program is being implemented and to identify supporting and inhibiting factors in its implementation.

This research uses a qualitative, descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The data sources consisted of 12 informants, including KORPRI administrators and members who received the Tali Asih Opname benefit, selected by purposive sampling. Collected data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model through data reduction, data display, and conclusion drawing.

The results show that the implementation of the Tali Asih Opname KORPRI program at BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Utara has not run smoothly. The communication aspect is lacking because information transmission remains informal and schedules for fund disbursement are uncertain, even though the policy substance is fairly clear. The resource aspect is relatively adequate: staff numbers are sufficient but lack formal training, publishing facilities, and an integrated digital system. The disposition aspect is functioning well, shown by implementers' responsiveness and strong commitment from the administrators. Meanwhile, the bureaucratic structure aspect is weak because the SOP has not been ratified by the Bupati and external coordination with beneficiary institutions is still poor. Inhibiting factors include weak information transmission and dissemination, absence of legally endorsed SOPs, lack of an integrated digital system, and weak external coordination with beneficiary institutions.

It is recommended that the Head of the Division for Mutation, Promotion, and Career Development expedite the ratification of the Standard Operating Procedure (SOP) by the Bupati. KORPRI administrators should set a fixed monthly disbursement schedule and develop a digital information system. Technical implementers should expand socialization channels through accessible media and build more structured coordination with all beneficiary institutions so members' welfare rights can be distributed more evenly and on time.